

Abstrak

Permendikbud No 27 Tahun 2016 menjadi tahapan baru pengelolaan pendidikan agama yang lebih inklusif, dimana siswa penghayat yang selama ini mengalami marginalisasi dan diskriminasi dalam hal layanan pendidikan agama saat ini telah dilayani dengan setara. Pendidikan agama selama ini lalai diperdebatkan dalam perspektif pendidikan inklusi. Pendidikan agama seakan sesuatu yang berbeda dan terpisah dari pendidikan inklusi, sebagaimana pendidikan inklusi yang umumnya fokus pada kelompok berkebutuhan khusus, yang tidak memasukkan agama. Tesis ini menunjukkan bahwa pendidikan agama perlu dilihat dalam perspektif pendidikan inklusi sebagai prinsip pengelolaan pendidikan untuk semua warga secara setara. Terkait itu, Pendidikan Kepercayaan yang di satu sisi dapat dilihat sebagai bagian dari pendidikan inklusi, tetapi di sisi lain, perspektifnya masih menyasar kelompok yang seakan dikategorikan sebagai kelompok berkebutuhan khusus. Akibatnya, kebijakan Pendidikan Kepercayaan tersebut belum mampu menyelesaikan masalah diskriminasi dalam praktik pendidikan seperti yang masih terus dialami oleh mereka yang tidak masuk dalam kategori enam (6) agama atau kepercayaan, seperti Baha'i, Yahudi, dan lain-lainnya. Tesis ini mengusung gagasan EFA sebagai perspektif pendidikan inklusi yang menekankan pentingnya memperbaiki kebijakan dan praktik pendidikan yang eksklusif dan diskriminatif.

The Minister of Education and Culture Regulation No. 27 year 2016 is a new stage in the management of religious education that is more inclusive, where Penghayat students who have experienced marginalization in religious education services can now be served equally. However, in the study of inclusive education, religious education is rarely debated. Religious education seems to be something different and separate from inclusive education, as inclusive education generally focuses on groups with special needs, which does not include religious issues. This thesis argues that religious education needs to be seen in the perspective of inclusive education as a principle of managing education for all citizens equally. In relation to it, Pendidikan Kepercayaan which in one hand can be seen as part of inclusive education, but on the other hand, strictly targets groups as if categorized with special needs. It applies the perspective of Special Education Needs (SEN). As a result, the kepercayaan education policy has not been able to solve the problem of discrimination in educational practice that remains discriminating those who do not fall into the category of six (6) religions or beliefs, such as Baha'is, Jews, and others. This thesis furthermore argues for education for all (EFA) as an inclusive education perspective that emphasizes the importance of revising exclusive and discriminatory educational policies and practices.

Keywords: religion, kepercayaan; inclusive education; SEN; EFA.